

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia terdiri atas dua macam yaitu Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional, Bank syariah sudah cukup lama berdiri di Indonesia. Bank syariah yang pertama berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1991, kemudian diikuti oleh Bank syariah Mandiri tahun 1999 hingga Bank syariah Mega tahun 2004, Jumlah Bank syariah yang terus bertambah ini cukup menggembirakan karena menambah kemampuan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional dan mengurangi angka kesenjangan ekonomi dengan konsep syariah yang diterapkan.

Pertumbuhan bank syariah baik dalam bentuk aset maupun penghimpunan dan penyaluran dana dalam beberapa tahun terakhir juga cukup menggembirakan, riset yang dilakukan Bank Indonesia membuktikan bahwa pada bulan Januari 2014 total asetnya mencapai Rp180,360 miliar. Pembiayaan yang diberikan Bank syariah telah mencapai Rp 184,120 miliar dan penghimpunan dana yang dilakukan juga mencapai Rp 161,924 miliar dan tingkat rentabilitas Bank syariah terhadap penggunaan asetnya juga cukup baik.

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
Tahun 2011-2016

Bank Syariah di Indonesia	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah	11	11	11	12	12	13
Jumlah Kantor	1390	1734	1987	2151	2121	1885
Unit Usaha Syariah	24	24	23	22	22	21
Jumlah Kantor	312	493	567	320	327	318
BPRS	155	158	163	163	162	164
Jumlah Kantor	364	401	402	439	452	446

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah,

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah kantor bank umum syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, jumlah kantor bank umum syariah di Indonesia adalah 1.390 kemudian mengalami pertambahan 344 kantor sehingga menjadi 1734 kantor pada tahun 2012. Dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada taun 2015 menjadi 2.121 kantor. Pada tahun 2016, jumlah kantor bank syariah mengalami

penurunan sebanyak 236 kantor, namun jumlah bank syariah mengalami peningkatan dari 12 Bank menjadi 13 Bank.

Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi bank syariah di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun. Kegiatan utama bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Tabel 1.2

Komposisi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 20011-2016 (dalam juta rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mudharabah	75.807	99.361	106.851	122.467	168.516	178.424
Musarakah	246.796	321.131	567.658	567.658	652.316	762.266
Murabahah	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.697	4.881.058
Salam	20	197	26	16	15	14
Istishna	23.673	20.751	17.614	12.881	11.135	9.289
Ijarah	13.815	13.522	8.318	5.179	6.175	7.351
Qardh	72.095	81.666	93.325	97.709	123.588	429.400
Multijasa	89.230	162.245	234.456	233.456	311.729	429.400
Total	2.675.930	3.553.520	4.433.492	5.004.909	5.765.171	6.407.580

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, www.bi.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 volume pembiayaan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, volume pembiayaan di BUS adalah 2.675.930 juta, kemudian meningkat 877.590 juta pada tahun 2012 sehingga menjadi 3.553.520 juta. Dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya hingga tahun 2016 mencapai 6.407.580 juta. Sebagian besar komposisi pembiayaan ini disumbang dari pembiayaan dengan akad murabahah yaitu sebesar 4.881.059 juta pada tahun 2016. Kemudian penyumbang terbesar kedua adalah dari pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan dengan akad mudharabah sebesar 178.424 juta dan pembiayaan dengan akad musyarakah sebesar 762.266 juta. Dengan tersedianya berbagai macam pilihan akad pembiayaan yang ditawarkan bank syariah salah satu jenis pembiayaan yang idealnya menjadi produk utama adalah pembiayaan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah). Hal tersebut menjadi penting karena bank syariah adalah sebuah bank dengan label bagi hasil dan hal tersebut telah menjadi trademark tersendiri dari bank syariah.

Banyak juga dari masyarakat yang hingga saat ini masih menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional padahal untuk membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah dengan prinsip bagi hasil tersebut. Jika kembali melihat dari tabel 1.2. terlihat bahwa dari tahun ke tahun pembiayaan bagi hasil terus mengalami peningkatan dan tentunya hal tersebut merupakan perkembangan yang bagus. Tapi satu hal yang sangat disayangkan bahwa

pembiayaan bagi hasil belum mampu melebihi pembiayaan Murabahah yang jumlahnya selalu naik dan melebihi pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan Murabahah ini sebenarnya merupakan sebuah kontrak jual beli. Berdasarkan data yang disajikan dalam statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah ini merupakan prioritas utama dalam kegiatan penyaluran dana dalam perbankan syariah, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menjadi prioritas kedua. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil berbasis bagi hasil. Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan core business sesungguhnya. Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya Murabahah, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya digunakan sementara pada saat awal pertumbuhan bank dengan tujuan untuk mencari nasabah baru.

Pada produk pembiayaan dengan skema murabahah, pembelian suatu kebutuhan diatas namakan nasabah dan lembaga keuangan syariah hanya berperan dalam pembiayaannya. Dalam hal ini permohonan nasabah akan dikabulkan bank apabila nasabah terlebih dahulu melakukan pembelian dan melakukan pembayaran sebagian dari barang yang akan dibeli (uang muka).

dan melalui pembiayaan murabahah nasabah akan terhindar dari riba. Selain itu produk pembiayaan murabahah banyak diminati banyak nasabah bukan tanpa alasan karena pembayaran pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah tidak dibayar secara tunai tetapi nasabah dapat mengangsurnya dengan perjanjian sesuai akad diawal. Pembiayaan murabahah banyak diminati karena pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti rumah, kendaraan dan mesin untuk usaha kecil menengah.

Bank syariah bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank syariah atas dasar kepercayaan, maka setiap bank harus selalu menjaga dirinya yang merupakan suatu konsekuensi guna mendukung terciptanya perbankan yang sehat. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan agunan/jaminan. Pasal 1 angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Ini berarti adanya kewajiban bagi bank dalam memberikan pembiayaan syariah, mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur mengembalikan pembiayaan. pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas ada dua pertanyaan penelitian yang bisa dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana proses Penerapan Jaminan atas Pembiayaan Murabahah pada PT.Bank Muamalat cabang Malang?
2. Resiko apa saja yang di hadapi dalam Pembiayaan Murabahah dan Bagaimana prosedur penyelesaian jika terjadi Pembiayaan Murabahah bermasalah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan proses penerapan jaminan atas pembiayaan murabahah pada PT.Muamalat cabang malang.
2. Untuk mendeskripsikan resiko-resiko dalam pembiayaan Murabahah dan prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi mudharib hasil dari penulisan proposal diharapkan dapat memberikan informasi bagi nasabah agar mengetahui tentang pembiayaan murabahah. Serta nasabah dapat menggunakan produk dengan informasi yang benar sesuai dengan kebutuhan produk yang akan digunakan.
2. Bagi Shahibul maal, hasil dari penulisan proposal ini dapat memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas produk pembiayaan murabahah agar lebih banyak diminati nasabah.
3. Bagi penulis, agar penulis mampu menerapkan sesuai dengan judul proposal yang ditulis dan penulis mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai pembiayaan murabah.